

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial*

Bi pan Chandra¹

I. Kolonialisme sebagai Formasi Sosial

(A) Kerapkali keterbelakangan dan hambatan-hambatan untuk perkembangan ekonomi dihasilkan oleh periode kolonial yang dapat terlihat dari cerminan-cerminan ekonomi pra-kapitalis atau keterbelakangan tradisional atau setidaknya sisa-sisa masa lalu pra-kolonial. Bahkan ketika keterbelakangan dilihat dalam 'perspektif historik,' yang mana peranan kolonialisme dipandang sebagai upaya modernisasi yang tidak berhasil. Misalnya, India mengalami kegagalan karena beban keterbelakangan masa lalunya, dan yang mana mengarah menjadi dua masyarakat, sebagian modern dan sebagian tradisional. Dalam beberapa dekade terakhir, selama abad ke-19, ini adalah pandangan dominan di antara para penulis metropolitan, hanya mereka yang dapat meyakinkan modernisasi yang paling unggul. Beberapa penulis pada abad ke-20 juga memandang kolonialisme sebagai masyarakat transisi, tetapi mereka tidak mempertanyakan: transisi ke arah mana? Dapatkah koloni berkembang, meskipun, lambat atau bertahap, ke dalam masyarakat modern atau masyarakat kapitalis industri, yakni, serupa dengan metropolis, 'tentunya' jika kolonialisme melanjutkan perkembangannya dalam satu periode yang cukup lama, apakah hal itu dapat berjalan tanpa penghancuran

^{*} Dimuat dalam *Journal Contemporary Asia*, vol. 8, no. 2, 1978.

¹ Sejarawan, saat ini mengajar di Pusat Studi Sejarah Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi.

kolonialisme?

Dalam kenyataannya koloni-koloni menjalankan transformasi yang mendasar di bawah kolonialisme. Koloni-koloni secara bertahap diintegrasikan ke dalam dunia kapitalisme modern. Koloni-koloni dan bekas koloni dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang terbelakang, setelah merdeka dengan kondisi-kondisi awal mereka mulai melakukan proses pembangunan, namun tidak semua masa lalu pra-kolonial mereka; mereka tercipta dalam periode kolonial, era yang mana terjadi dalam "dorongan gencar modernisasi dari luar."² Sejauh sisi tradisional masih ada, berarti kondisi-kondisi tersebut, mengevolusi masyarakat-masyarakat tradisional pra-kolonial ke dalam masyarakat kolonial. Dengan demikian, misalnya, India di bawah Inggris tidak secara mendasar serupa dengan India Mughal; maupun masyarakat pra-kolonial dengan masyarakat kapitalisme industri akibatnya terasa jauh berbeda. Pada kenyataannya, kolonialisme India yang beriringan dengan kapitalisme industrial Inggris adalah fenomena sejarah modern; dua perkembangan yang berjalan bersama-sama.³ Dan cukup menarik, integrasi mendasar India, sebagaimana juga koloni-koloni lainnya, dengan ekonomi kapitalis dunia dan transformasi kapitalisme ke dalam koloni klasik terjadi selama abad ke-19 yang disesuaikan dengan bendera modernisasi, pembangunan ekonomi, dan pencangkakan kapitalisme. Pola modernisasi kolonial seperti ini tidak terelakkan mengarah ke "pembangunan keterbelakangan," sesuai dengan ungkapan yang dipergunakan oleh Andre Gunder Frank. Proses sosial, politik, ekonomi yang serupa yang mana menghasilkan perkembangan sosial yang dihasilkan oleh metropolis dan ditegakkannya ketidakkmajuan dan keterbelakangan di koloni. Dua negeri yang secara organik berhubungan dan berpartisipasi selama beberapa dekade dan berabad-abad pada umumnya, terintegrasi ke dalam sistem ekonomi dunia, bahkan dengan konsekuensi yang bertentangan. Sehingga pada saat yang

² Myrdal, Gunnar, *Asian Drama*, Penguin Edition, Vol. I, 1968, hal. 704.

³ Sebagaimana J.S. Furnivall katakan: "India modern tumbuh berdampingan dengan Eropa modern," *Colonial Policy and Practise*, 1956, hal. 537-8.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial sama koloni dimodernisasi dan diterbelakangkan.⁴

Saya nampaknya mendekati bagian ini dengan kutipan panjang dari apa yang saya tulis pada tahun 1971:

... studi kolonialisme dapat dibantu bila studi tersebut dapat melihat tahapan historis yang berbeda atau periode perkembangan sejarah modern di India yang mana mencampurkan antara tradisional, masyarakat pra-Inggris, ekonomi pra-kapitalis dengan kapitalis modern, atau ekonomi sosialis dan masyarakat sosialis. Ini semua tidak semata-mata beradaptasi atau menyimpang terhadap yang lama, masyarakat dimodernisasi tidak secara parsial, maupun negara masyarakat dalam peralihan. Itu semua juga tidak tepat dan ciri-ciri negatif dan positif dari dua hal yang dicampur-adukkan juga tidak sesuai. Ini 'semua' merupakan struktur yang kokoh, formasi sosial (sistem) yang berbeda atau sub-formasi (sub-sistem) yang didasarkan pengawasan ekonomi dan masyarakat di tangan-tangan kapitalis asing yang berfungsi di koloni (atau semi koloni) melalui ketergantungan dan kepatuhan ekonomi, sosial, politik dan intelektual, semua bentuk struktur dapat disesuaikan dengan kondisi-kondisi perubahan perkembangan historis kapitalisme sebagai sistem seluruh dunia.

Di sini saya hendak mengulangi pernyataan saya, bahwa penguasa Inggris menghancurkan basis ekonomi dan politik masyarakat lama. Terjadinya pembubaran cara produksi pra-kapitalis lama; tetapi sistem kapitalis yang baru tidak berlangsung; meskipun cara produksi kolonial yang baru telah masuk ke dalam. Misalnya, setelah diperkenalkan sistem sewa tanah pada tahun 1793, secara sempurna

⁴ Salah satu alasan mengapa tradisi model modernitas adalah alat yang menyesatkan untuk menganalisa pasca-kolonial. Tentunya setelah koloni-koloni mengalami modernisasi.

menghancurkan relasi-relasi agraris yang lama. Struktur agraris yang baru dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan kolonialisme dan niscaya dengan akibat terlepasnya kekuatan-kekuatan ekonomi dari struktur lama semi-feodal, tetapi struktur yang lama dengan begitu menampilkan struktur yang baru; struktur yang baru tidak dihidupkan dari yang lama. Kenyataannya, seluruh struktur sosial India, relasi-relasi yang baru dan klas-klas yang baru -- struktur klas internal yang baru -- di mana pengembangannya diproduksi, dan diintegrasikan sepenuhnya dengan, kolonialisme. Sebagian kekacauan muncul dari situasi kesejarahan yang rumit. Kapitalisme dunia adalah sistem yang tunggal dan kolonialisme merupakan landasan dari sistem kapitalisme. Meskipun kolonialisme mempunyai karakteristik yang berbeda dengan kapitalisme. Oleh karena itu, kita mempunyai, pandangan yang sama terhadap sistem imperialisme-kolonialisme dalam dua bentuk kesatuan yang terpisah, satu di koloni dan yang lainnya di metropolis.⁵

(B) Secara tradisional, kolonialisme dilihat sebagai hasil ideologi atau personaliti atau kebijakan yang dengan sendirinya sangat berpedoman dari yang pertama dan yang kedua. Sehingga jika membedakan administrator-administrator kolonial dapat diperlihatkan perbedaan motif-motif personal, gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan, kesimpulan dari semua itu nampaknya kolonialisme tidak mempunyai pengertian yang lengkap, kecuali sebagai penguasa politik asing. Demikian pula, dewasa ini banyak ekonom yang berhubungan dengan teori pembangunan yang mengkritik peranan kapitalisme, tetapi kolonialisme dilihat semata-mata dalam aspek dominasi politik asing.

Sebagaimana penjelasan di muka, kecenderungan dewasa ini

⁵ Chandra, Bipan, "Colonialism and Modernization," *Proceedings of Indian History Congress*, Jabalpur Session, hal. 22-23, 1971. Selanjutnya sumbangan tema ini dikembangkan oleh Jairus Banaji dan Hamza Alavi.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

melihat kolonialisme sebagai struktur. Masih belum ada sumber-sumber intelektual untuk memahami struktur kolonialisme secara lengkap dan mencakup bermacam ragam jaringan dan keterkaitan -- lapisan dan lalu-lintas -- yang mana melalui artikulasi struktur kolonialisme. Tetapi kita dapat menegaskan bahwa kolonialisme lebih banyak merupakan pengawasan politik atau kebijaksanaan kolonial. "Negara kolonial niscaya bagian dari sistem kolonial: negara kolonial adalah instrumen melalui sistem yang sangat diperkuat; dan kebijakan-kebijakan kolonial membantu mengembangkan dan menegakkan struktur kolonial. Namun negara kolonial dan kebijakan-kebijakan kolonial bukan merupakan esensi kolonialisme. Kolonialisme adalah penyempurnaan dari integrasi yang kompleks dan melibatkan ekonomi India dan masyarakat India dibawa masuk ke dalam kapitalisme dunia dengan tahap-tahap melalui hampir dua abad pengabdian.⁶

Sehingga ketika kita mengatakan kolonialisme dilihat sebagai sebuah struktur, kita mengartikan kepentingan-kepentingan kolonial, kebijakan-kebijakan, negara dan lembaga-lembaga kolonial, kebudayaan dan masyarakat kolonial, gagasan-gagasan serta ideologi-ideologi, dan personalitas-personalitas kolonial dilihat sebagai fungsi di dalam karakteristik struktur kolonial, yang mana kolonialisme sendiri dapat dibatasi oleh saling keterkaitannya secara keseluruhan.

(C) Benturan awal struktur kolonialisme antara metropolis kapitalis dengan ekonomi dan masyarakat koloni diawali melalui subordinasi metropolis, sehingga pola-pola perubahan subordinasi dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensinya, kolonialisme dari awalnya menjalankan keterbelakangan. Pandangan ini tidak hanya bertentangan dengan pandangan kapitalis-kolonial yang tradisional bahwa pembangunan kolonialisme dan modernisasi kolonial -- atau sedikitnya dicoba dilakukan -- namun juga pandangan marxis tradisional, bahwa kolonialisme berangkat melalui dua tahap, satu positif dan yang lainnya negatif, yang positif berkaitan dengan

⁶ Chandra, Bipan, "Colonialism and Modernization," *op.cit.*, hal. 21.

periode yang pertama dan yang negatif berhubungan dengan yang kedua, karakter tahapan pertama selama pra-imperialis dan dampak terhadap kolonialisme secara keseluruhan positif meskipun banyak kejahatan, banyak penindasan, sedangkan giliran tahap kedua yang negatif, zaman imperialisme modern (imperialisme finans) termasuk tahap antara 1870 hingga 1914.

Pada kenyataannya, aspek-aspek dan dampak-dampak kolonialisme dijalankan secara serempak. Yang disebut aspek positif adalah bagian integral, dan aspek negatif dari kolonialisme adalah, yang secara efektif memperbesar struktur. Tahap-tahap kolonialisme yang positif dan negatif agaknya merupakan tahap-tahap dalam kognisi dan pemahaman fenomena kolonial dengan penipuan-penipuannya. Sehingga banyak intelektual kolonial dan metropolitan, termasuk Marx sebelum 1859, gagal untuk memahami ciri-ciri utama masyarakat kolonial dalam tahun-tahun awal pembentukan struktur kolonial dan menghadirkan ketentuan citra kolonialisme yang positif. Lambat-laun, sebagai kenyataan dipermukaan, mereka mampu melihat ciri-ciri esensial kolonialisme yang negatif. Meskipun intelektual melihat aspek-aspek perubahan dan sejarah politik berhubungan dengan tahap-tahap awal kolonialisme, mereka berasumsi bahwa kenyataan koloni mengalami kekalahan yang drastis. Tulisan-tulisan Hobson dan Lenin, atau membaca tulisan-tulisan Lenin dengan sepenggal-sepenggal, menganggap tahap imperialisme yang baru pada paruh akhir abad ke-19 akan menambah ketidakpahaman terhadap kolonialisme.

(D) Dasar dari kolonialisme adalah eksploitasi ekonomi atau pengedukan surplus sosial dari koloni. Bentuk-bentuk pengedukan surplus atau yang mana pola-pola ekonomi dan masyarakat koloni disubordinasi dan menyerahkan jasa ke metropolis, perubahan-perubahan dijalankan dalam waktu yang lama. Dan kebijakan kolonial, negara dan lembaga-lembaga kolonial, budaya, gagasan-gagasan dan ideologi-ideologi merupakan bentuk-bentuk perubahan yang dilakukan.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

Sehingga, kolonialisme, tidak dilihat sebagai satu keberlanjutan dan struktur yang sama; namun kolonialisme melalui tahap-tahap yang berhubungan dengan bentuk-bentuk pengedukan surplus.⁷

Secara historis, kolonialisme menjalani tiga tahap yang berbeda, setiap tahap mewakili pola subordinasi ekonomi, masyarakat, dan lingkungan politik kolonial yang berbeda, dan mengakibatkan kebijakan-kebijakan kolonial, ideologi-ideologi, dampak serta tanggapan rakyat kolonial yang berbeda. Perubahan dari satu tahap ke tahap lainnya secara parsial mengakibatkan perubahan pola-pola sosial, ekonomi, serta perkembangan politik di metropolis, dan perubahan posisi metropolis dengan ekonomi dan lingkungan politik dunia.

Tahap-tahap kolonialisme bagi koloni-koloni yang berbeda tidak dibatasi oleh wawasan yang sama; namun tahap-tahap tersebut secara luas mengandung pokok yang sama bagi semua koloni. Walaupun, tahap-tahap tidak berada dalam bentuk-bentuk yang murni; dalam pengertian setiap tahap adalah sebuah abstraksi. Maupun pemenggalan penajaman antara satu tahap dengan tahap lainnya. Bentuk-bentuk surplus yang diperoleh dan ciri-ciri kolonialisme lainnya dari tahap awal berlanjut ke tahap selanjutnya. Bagaimanapun, setiap tahap, mempunyai pemenggalan yang berbeda, ciri-ciri kualitatif yang dominan yang memisahkan tahap pertama dari tahap lainnya. Ciri-ciri kualitatif yang dominan juga perlu dikemukakan, bentuk baru pengedukan surplus menjadi terhenti pertumbuhannya dalam koloni yang khas karena faktor-faktor historis yang berbeda. Jadi tahap ketiga adalah, tahap imperialis finans yang pertumbuhannya terhenti di India; kedua, tahap perdagangan bebas di Indonesia, dan yang pertama dan kedua, tahap merkantilis perdagangan bebas di Mesir.

⁷ Definisi kolonialisme semata-mata dikaburkan oleh aspek utamanya, dominasi politiknya. Meskipun penaklukan koloni itu sendiri dalam banyak kasus diciptakan oleh negara kolonial dan hampir seluruh kasus dibayar oleh rakyat dan negara kolonial.

II Garis Besar Tahap-Tahap Kolonialisme

(A) *Tahap Pertama: Periode Monopoli Perdagangan dan Penedugan Hasil*

Selama tahap pertama kolonialisme dasar obyektif kolonialisme adalah (i) monopoli perdagangan dengan koloni, saudagar-saudagar Eropa lainnya berhadapan langsung (*vis-a-vis*) dengan pedagang-pedagang serta produsen-produsen koloni. Walaupun demikian, pada suatu ketika tukang-tukang yang trampil atau produsen-produsen lainnya akan bekerja untuk kepentingan negara kolonial, perusahaan-perusahaan atau saudagar-saudagar, mereka mendukung surplus tidak menggunakan ukuran pola industri kapitalis tetapi dengan cara saudagar-pengriba. (ii) Pengaturan penedugan pajak atau surplus melalui kekuatan negara. Negara kolonial atau perusahaan-perusahaan memerlukan sumber-sumber keuangan yang besar untuk memelihara angkatan laut, pelabuhan-pelabuhan, tentara dan pos-pos perdagangan. Pengaturan penedugan surplus dari koloni juga memerlukan anggaran belanja untuk produk-produk kolonial, sejak koloni-koloni tidak mampu untuk mengimpor produk-produk dari metropolitan. Penedugan surplus secara langsung juga dimanfaatkan sebagai sumber keuntungan bagi saudagar-saudagar, perusahaan-perusahaan, dan kas metropolis. Sebagian besar orang Eropa dipekerjakan di koloni juga sebagian besar surplus secara langsung diperoleh melalui pemerasan dan korupsi atau gaji-gaji yang tinggi.

Perlu dikemukakan dalam tahap ini (i) elemen perampasan dan penedugan surplus melalui perampasan sangat kuat selama tahap kolonialisme ini; dan (ii) tidak ada impor manufaktur yang signifikan dari metropolitan ke koloni.

Ciri utama pemerintahan kolonial selama periode ini adalah tidak ada perubahan mendasar dalam mengintrodusir administrasi di koloni, sistem pengadilan, transportasi dan komunikasi, metode-metode pertanian atau produksi industri, bentuk-bentuk urusan pemasaran, atau organisasi ekonomi (kecuali menghasilkan sistem

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

dan perkebunan-perkebunan di beberapa koloni) pendidikan atau lapangan intelektual, kebudayaan, dan organisasi sosial. Perubahan-perubahan dilaksanakan hanya pada organisasi dan teknologi, yang mana pada saat itu kepala-kepala suku yang merdeka serta penguasa-penguasa koloni juga dicoba diikutsertakan, dan ditempatkan dalam struktur administrasi tertinggi untuk turut mengumpulkan pajak agar penarikan pajak lebih efisien.

Kenapa harus demikian? Karena cara pengedukan surplus kolonial melalui pembelian produk tukang-tukang ahli di kota koloni dan perkebunan serta produksi-produksi lainnya melalui monopoli pembelian dan melalui pengawasan dalam penarikan pajak, *tidak diperlukan perubahan mendasar dalam sosio-ekonomi dan administrasi di koloni. Koloni benar-benar dipaksa untuk menerima keberadaan ekonomi, sosial, kebudayaan, ideologi, dan struktur politik kolonial.* Juga kekuasaan kolonial tidak perlu melakukan penetrasi pedesaan lebih dalam, lebih baik mempergunakan penguasa-penguasa pribumi selama mereka dalam melakukan pengedukan surplus ekonomi dengan baik.

Tidak diperlukannya perubahan juga tercermin dalam ideologi-ideologi penguasa. Di mana, karena, tidak ada 'ideologi pembangunan' atau gembar-gembor pembangunan. Tidak ada perubahan ekonomi kolonial tetapi keberlangsungan ekonomi koloni berdasarkan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu juga tidak banyak dibutuhkan untuk mengembangkan peradaban kolonial, agama, hukum, dan sebagainya, bagi mereka melakukan hal semacam itu dilihat sebagai hambatan untuk melaksanakan cara-cara pengedukan surplus. Kebutuhan untuk memahami cara-cara penarikan surplus sehingga roda-roda administrasi bergerak lebih lancar. Kritik yang dilakukan oleh para misionari juga dibatasi.

(B) Tahap Kedua: Eksploitasi melalui Perdagangan

Perkembangan industri yang baru dan kepentingan-kepentingan di metropolis serta ideologi-ideologinya lambat-laun mulai

penyedia bahan-bahan mentah di dalam perspektif perluasan reproduksi.

Sehingga esensi tahap kedua kolonialisme adalah mengarahkan koloni ke dalam subordinasi *partner* dagang yang dapat mengekspor bahan-bahan mentah serta impor manufaktur. Penedugan surplus sosial dari koloni melalui perdagangan atas dasar penjualan yang murah dan pembelian yang murah. Tahap kolonialisme ini bahkan mencakup mencegah kebebasan berpolitik negeri-negeri koloni.

Masalahnya masih menunggu keputusan mekanisme penedugan surplus di koloni di bawah kondisi-kondisi daya beli metropolis serta persaingan harga penjualan. Aliran dominan ekonom-ekonom di Eropa, hampir selama dua abad, menyangkal keterlibatan eksploitasi dalam keterkaitan yang khas; agaknya, penyangkalan eksploitasi ditegakkan melalui teori perbandingan harga dan pembagian kerja internasional, kedua sisi ini menguntungkan keterkaitan ekonomi. Banyak kritik terhadap tahap kolonialisme kedua, yang berpendapat bahwa eksploitasi koloni berlangsung melalui nilai tukar terhadap seluruh gerak yang menentang produk-produk primer. Hal ini senantiasa tidak benar. Harga ekspor di metropolis jatuh merosot ketimbang harga impor. Jatuhnya harga berkaitan dengan cerminan perbaikan teknologi serta pembesaran teknologi dan terutama dimanfaatkannya mesin dengan lebih baik, yang memungkinkan diperluasnya perdagangan serta pelebaran pasar. Meningkatnya harga-harga impor dan jatuhnya harga ekspor memperluas ekspor jauh lebih memadai untuk mengarah pada peningkatan produktivitas hasil bahan-bahan mentah di koloni. Oleh sebab itu persoalan pokok bagi tahap kolonialisme kedua, adalah apa yang terjadi dengan produktivitas di metropolis serta di koloni.

Masalah mekanisme penedugan surplus di tahap kedua kolonialisme dalam beberapa tahun belakangan ini ditelaah kembali pada karya Agrghiri Emmanuel dan Samir Amin.

Koloni tidak dapat dieksploitir dalam cara baru dengan melangsungkan eksploitasi ekonomi, politik, administratif, sosial, budaya, serta ikatan ideologi; keadaan ini untuk menghancurkan serta mentransformasikan seluruh struktur kolonial.

Transformasi ini secara aktif dikerjakan di bawah slogan pembangunan dan modernisasi. Dalam lapangan ekonomi ini berarti mengintegrasikan ekonomi kolonial dengan ekonomi dunia kapitalis dan yang terpenting ekonomi metropolitan. Instrumen utama terhadap integrasi tersebut adalah perdagangan bebas luar negeri di koloni terhadap semua pembatasan dan tarif, teristimewa sejauh menyangkut perdagangan luar-negeri dengan metropolis. Periode ini merupakan tahap yang penting, lebih jauh koloni terlibat dengan negeri perdagangan bebas ketimbang dengan metropolisnya sendiri. Masuknya kebebasan sekarang diberikan kepada kapitalis untuk mengembangkan perkebunan metropolis, perdagangan, transportasi, tambang, dan beberapa kasus industri di koloni. Negara kolonial aktif menyumbang keuangan dan lainnya untuk membantu kapitalis metropolitan, bahkan ketika doktrin *laissez faire* kekuasaannya merajalela di dalam negeri. Struktur agraria koloni diusahakan untuk ditransformasikan dengan tujuan membuat koloni lebih banyak mereproduksi dengan menginisiasi agrikultur kapitalis. Demikian pula, usaha utama untuk membuat perbaikan sistem transportasi dan komunikasi.

Perubahan utama berlangsung dalam bidang administratif. Sekarang administrasi kolonial menjadi lebih terperinci dan juga mengkonprehensifkan perembesan ke bawah seandainya produk-produk metropolitan melakukan penetrasi ke kota-kota dan desa-desa pedalaman serta produksi pertanian mereka begitu berlarut-larut. Struktur legal di koloni harus berhasil sebagai kontrak resmi (*sanctify*) dan esensial penyelenggaraan kontrak yang legal jika keperluan transaksi jutaan bagi pengembangan impor serta ekspor barang-barang menjadi aktif. Penyelenggaraan ekspor-impor berlangsung selama tahap ini, kapitalis Barat dengan resmi memperkenalkan sistem pengadilan di koloni-koloni dan semi-

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

koloni. Bagaimanapun, perubahan-perubahan, kerap kali hanya berkaitan dengan hukum kriminal, hukum kontrak, dan prosedur-prosedur hukum sipil; hukum personal, termasuk perkawinan serta warisan, sering tidak disentuh.

Sekarang diperkenalkan pendidikan modern, dengan perluasan lebih besar atau lebih kecil, secara mendasar dengan pandangan untuk menciptakan manusia baru, mesin administratif sangat diperluas, namun juga sebagai aspek transformasi masyarakat dan kebudayaan koloni, yang mana kedua aspek tersebut, dengan pandangan untuk membuat pengembangan reproduksi kolonial dan untuk mengembangkan budaya patuh di antara rakyat kolonial. Banyak intelektual di koloni juga mengibarkan bendera modernisasi dan budaya namun dengan alasan-alasan yang bertentangan.

Tahap kedua kolonialisme membangkitkan ideologi politik imperialis yang liberal di antara bagian-bagian pernyataan imperialis serta para administratornya membicarakan untuk melatih rakyat kolonial dalam seni demokrasi dan pemerintahan sendiri. Para administrator imperialis percaya jika rakyat kolonial 'diajarkan' hukum-hukum kebajikan dan tata tertib, bisnis-bisnis kontrak yang resmi, perdagangan bebas, dan pembangunan ekonomi, keterkaitan ekonomi diletakkan pada inti mengekalkan tahap kedua kolonialisme, sekalipun kekuatan metropolitan menarik diri dari pengaturan politik dan pengawasan administrasi.

Usaha mentransformasikan struktur sosio-ekonomi koloni syarat yang tidak terelakkan, bahwa kelangsungan budaya dan masyarakat koloni dianggap tidak memadai dan mengalami kemerosotan. Sekarang mereka mengkritik dengan tajam pengawasan ketat oleh negara kolonial. Tahap ini juga membuktikan melahirkan pengikut ideologi pembangunan. Karena munculnya ekonomi 'pembangunan' setelah Perang Dunia Kedua dalam periode keberhasilan gerakan-gerakan pembebasan nasional, hal ini kerap kali dilupakan bahwa ekonomi kolonisasi, banyak menjadikan koloni di bawah bendera

ideologi pembangunan. Selain itu, seringkali dua teori ekonomi pembangunan memiliki kemiripan, meskipun sama sekali dipisahkan oleh pergeseran zaman. Pada awalnya teori ekonomi pembangunan menegaskan (i) hukum dan tata tertib, (ii) pemilikan pribadi atas tanah, (iii) penanaman modal asing untuk menggantikan kekurangan modal di koloni dan untuk memberikan contoh kepada pengusaha domestik, (iv) pembangunan alat-alat transportasi, (v) mengembangkan perdagangan luar-negeri, (vi) pendidikan modern yang dapat memungkinkan rakyat kolonial untuk memahami teori-teori pembangunan, dan (vii) kebudayaan modern yang dapat mengembangkan kebiasaan menghemat (menabung) dan keberanian berusaha.

Diperlukan satu petunjuk untuk menegaskan hubungan ini: Otoritas kolonial tidak sengaja meletakkan keterbelakangan koloni. Sebaliknya, mereka berusaha sepenuhnya untuk membangun koloni sehingga koloni dapat disempurnakan, meskipun dalam posisi subordinasi, masyarakat dan ekonomi metropolitan. *Keterbelakangan bukan keinginan tetapi konsekuensi yang tak terelakkan terhadap kerja perdagangan kolonialisme yang tidak dapat ditawar-tawar dan kontradiksi-kontradiksi di dalam perdagangan kolonialisme. Untuk alasan yang sama, di sana tidak ada teori imperialisme keterbelakangan -- keterbelakangan adalah hasil praktek teori-teori pembangunan yang khas.*

Bentuk-bentuk awal pengedukan surplus dilanjutkan selama tahap ini dan menjadi tak henti-hentinya atas kerja penuh kolonialisme. Ditambah, sejak itu koloni juga membayar ongkos transformasi pembangunan, beban atas petani kolonial semakin meningkat.

Dalam banyak sektor upaya dalam praktek transformasional dibatasi dan yang terpenting dalam sektor agrikultural karena kontradiksi-kontradiksi di dalam tubuh kolonialisme. Contohnya, kolonialisme selama tahap ini, banyak koloni memperoleh apa yang dikenal sebagai ciri-ciri 'semi-feodal' pada agrikultur mereka.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

(C) Tahap Ketiga: Era Penanaman Modal Asing dan Kompetisi Internasional untuk Memperebutkan Koloni-Koloni.

Tahap baru kolonialisme menunjukkan hasil beberapa perubahan utama dalam ekonomi dunia; lajunya industrialisasi untuk beberapa negeri di Eropa, Amerika Utara, dan Jepang; intensifikasi industrialisasi sebagai hasil penerapan pengetahuan ilmiah bagi industri; selanjutnya penggabungan pasar dunia yang berkaitan dengan revolusi dalam alat-alat transportasi internasional. Di mana sekarang terjadi perjuangan yang kuat bagi pasar-pasar eksklusif yang baru, dan terjamin serta perjuangan untuk memperoleh sumber-sumber bahan mentah mineral dan pertanian dan bahan makanan. Selain itu, diperluasnya reproduksi di dalam negeri dan mempertajam eksploitasi koloni-koloni serta semi-koloni untuk menghasilkan akumulasi kapital yang besar bagi negeri-negeri kapitalis maju. Berlangsungnya konsentrasi kapital secara serempak dan penggabungan kapital bank dengan kapital industri di beberapa negeri. Hal ini mengarah kepada ekspor kapital skala besar serta mencari lapangan-lapangan monopoli dan wilayah-wilayah yang dapat ditanamkan kapital. Seluruhnya terdiri dari tiga aspek, yakni pasar, sumber-sumber bahan mentah, dan kapital ekspor, ketiganya saling berkaitan, dan tidak satupun di antara ketiganya dapat menaikkan ongkos produksi satu sama lain secara berlebihan. Contohnya, luasnya penanaman modal dapat menopang lajunya laba di dalam negeri, bantuan produksi bahan-bahan mentah, dan secara langsung atau tidak langsung menciptakan pasar bagi produk industri dalam negeri. Perjuangan bagi pembagian dan pembagian kembali dunia di antara negeri-negeri imperialis sangat diperkuat, penyegaran digunakan untuk menemukan koloni-koloni yang lama. Penarikan surplus sosial dan tenaga-kerja yang mereka lakukan digunakan untuk menanggapi perjuangan ini. Kolonialisme pada tahap ini juga membawa kepentingan politik dan tujuan-tujuan ideologi di metropolis. Nasionalisme atau Chauvinisme, petualang, pemujaan *empire* dapat digunakan untuk memperlambat pertumbuhan pembagian kerja di dalam negeri dengan menekankan kepentingan-kepentingan umum di *empire*. Lebih istimewa, *empire* dan pemujaan tersebut digunakan untuk

menanggapi pertumbuhan demokrasi rakyat dan serta mengintroduksi hak suara orang dewasa, sikap yang dapat membahayakan dominasi politik kelas kapitalis dan dapat meningkatkan pentingnya instrumen-instrumen hegemoni ideologi atas masyarakat. Gagasan hegemoni ideologi *empire* memainkan peranan yang semakin penting.

Metropolitan berusaha dengan giat membuat pengawasan yang terkonsolidasi terhadap koloni-koloni yang diperoleh dalam tahap awal. Sekarang kebijakan-kebijakan imperialis reaksioner diganti dengan kebijakan-kebijakan imperialis liberal. Untuk mengawetkan kelangsungan kekuasaan kolonial atas basis permanen, secara esensial sekarang didasarkan atas seluruh perhitungan, namun teristimewa untuk menarik kapital metropolitan ke koloni dan menyediakan jaminan keamanan kapital metropolitan. Bagaimanapun hal ini harus dikemukakan berkenaan dengan peranan penting kelangsungan koloni-koloni agar lebih dapat diharapkan atau memotivasi hal yang potensial ketimbang hal yang aktual. Bagaimanapun, potensial, sama dengan motif pengawasan metropolitan terhadap koloni sangat kuat dan penting. Dalam kenyataannya, pada tahap pertama dan kedua, banyak koloni dan semi-koloni gagal untuk menyedot kuantitas kapital metropolitan mengeksport surplus-surplus sosial lebih banyak ketimbang impor kapital ke dalam metropolitan. Bahkan, kerap kali perluasan penanaman modal asing dibatasi di metropolitan, sebab sebagian kecil pengedukan surplus sosial dilakukan oleh metropolis. *Alasan utama kenapa kapital metropolitan tidak ditanam di koloni-koloni, karena tingkat kerusakan ekonomi koloni semakin signifikan atau keterbelakangan selama tahap kedua kolonialisme.* Jika kapital asing diinvestasikan di koloni-koloni, produk-produk metropolitan terutama harus dijual di koloni -- namun kegagalan mereka mereproduksi koloni-koloni selama tahap kedua, sekarang sedikit banyak mereka membuka koloni untuk kepentingan modal asing. Ditambah pula dengan keadaan kapitalisme di dalam negeri, *Keadaan kapitalisme di koloni-koloni dalam tahap yang sekarat!* Konsekuensinya, bahkan penanaman

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

modal asing dibatasi hanya di bidang pengusahaan pertanian atau industri yang mana produknya siap dipasarkan di luar koloni atau menyediakan infrastruktur bagi keperluan ekspor. Pasar kolonial kurang bermanfaat untuk kapitalis asing, kebanyakan kasus setelah pasar koloni ditemukan, pasar mengalami himpitan dan kerusakan berat. Bagaimanapun, keadaan pasar koloni seperti ini, tetap mengharuskan tekanan pada dilanjutkannya penyerapan potensial kapital asing ke koloni-koloni bagi keberlangsungan kekuatan *El Doradoes* (surga yang dihayalkan) yang dipengaruhi oleh kebijakan kolonial.

Bentuk-bentuk awal pengedukan surplus sekali lagi dilanjutkan dalam tahap ini. Kenyataannya, beberapa koloni, terutama India, awal bentuk kedua pengedukan surplus tetap lebih penting ketimbang tahap ketiga atau pertama.

Secara politik dan administratif tahap ketiga kolonialisme berarti pembaruan dari tahap sebelumnya serta pengawasan lebih intensif atas koloni. Selain itu, yang lebih penting tahap ketiga sekarang, bahwa administrasi kolonial dapat merembes ke setiap pori-pori masyarakat kolonial dan setiap pelabuhan, kota kecil, pedesaan berkaitan dengan ekonomi dunia. Sekarang administrasi juga menjadi lebih birokratik, terperinci dan efisien.

Sekarang perubahan utama terjadi dalam ideologi kolonialisme. Pembicaraan tentang melatih rakyat kolonial untuk merdeka dimatikan dan hanya menghidupkan kembali tekanan di bawah gerakan-gerakan anti-imperialisme. Malahan melahirkan perbincangan despotisme yang penuh kebajikan, keberadaan rakyat kolonial secara permanen belum dewasa atau rakyat yang masih 'kanak-kanak' atas kegelisahannya diperlukan perwalian yang permanen. Geografi, 'ras,' iklim, sejarah, organisasi sosial, budaya, agama rakyat kolonial ditunjuk sebagai faktor-faktor yang membuat mereka secara permanen tidak layak untuk pemerintahan-sendiri. Tahap ini sangat tajam bedanya dengan tahap kedua yang mana rakyat kolonial dipercayai mampu untuk

dididik dan dilatih menjadi tiruan rakyat Eropa yang maju dan oleh karena itu berhak mendirikan bangsa-bangsa yang memerintah diri sendiri.

Upaya-upaya transformasi ekonomi, masyarakat, dan budaya koloni dilanjutkan selama tahap ini juga sekali lagi melalui hasil-hasil yang telah diperbaiki. Bagaimanapun, kecenderungan dikembangkannya pemutusan sosial dan modernisasi budaya, khususnya sebagai kekuatan-kekuatan anti-imperialis merupakan tugas yang baru dimulai. Administrasi kolonial semakin dianggap mempunyai sikap netral terhadap masalah-masalah sosial dan budaya dan kemudian mulai mendukung reaksi sosial dan budaya atas nama pengawetan lembaga-lembaga pribumi.

III. Negara Kolonial

Bagian terakhir dari tulisan ini, saya ingin menyusun beberapa catatan pendahuluan dan ciri-ciri sementara mengenai negara kolonial, sedangkan menyesuaikan dengan fakta studi sejarah yang serius mengenai sifat negara kolonial serta hubungannya dengan masyarakat kolonial masih dalam penggarapan. Perbedaan utama antara negara kolonial dengan negara kapitalis adalah kekhususan kesejarahannya; sebaliknya kerangka teoritis kita serupa seperti yang disusun dalam studi negara kapitalis oleh Marx, Engels, dan Lenin dan selanjutnya dikembangkan oleh Antonio Gramsci, Ralph Milliband, Nicolas Poulanzas dan lain-lainya. Usaha kita terutama menguraikan apa yang menjadi keistimewaan kolonial di sekitar negara kolonial.

(A) Apa yang dikatakan Marx tentang keberadaan negara "semata-mata alat dari kelas yang berkuasa untuk menindas kelas lainnya" digunakan untuk negara kolonial tetapi dengan landasan yang berbeda: negara kolonial adalah alat untuk *menindas seluruh masyarakat*. Sebenarnya asumsi ini menjadi tidak dapat disangkal namun yang menjadi perlu ditegaskan di sini hampir semua sejarawan dan ilmuwan sosial yang mempelajari imperialis

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial mengabaikan atau mengaburkan aspek ini.

Negara kolonial memainkan peranan yang sangat besar, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, barangkali di dalam sistem kolonial ada formasi sosial lainnya. Pertama-tama, kolonialisme adalah struktur dari negara kolonial.⁸ Tidak seperti di sistem kapitalis, di mana negara terutama berperan untuk secara legal menyediakan lembaga infrastruktur bagi relasi-relasi produksi kapitalis dan di mana negara kerap kali tidak memaksakan turut dalam proses produksi hingga abad ke-20 dan sistem dipelihara oleh proses produksi itu sendiri, negara kolonial tidak memancangkan superstruktur atas basis ekonomi kolonial; negara kolonial elemen yang integral dan turut campur tangan dalam menstrukturkan dan memfungsikan ekonomi kolonial. Sedangkan “‘klas penguasa’ dalam masyarakat kapitalis yang memiliki dan mengawasi alat-alat produksi dan mempunyai wewenang, didasarkan atas kekuatan ekonomi sehingga dapat berunding dengan negara, negara dimanfaatkan sebagai alat kekuasaan klas kapitalis untuk mendominasi masyarakat,”⁹ di bawah kolonialisme merupakan kasus yang sebaliknya. Karena di bawah kolonialisme pengawasan koloni melalui negara kolonial, maka kapitalisme metropolitan mampu untuk mensubordinasikan pengawasannya, dan mengeksploitasi masyarakat. Sebenarnya kurun ini sama dengan periode *laissez faire*.

Jaminan hukum negara kolonial dan tata tertib keamanan yang dimilikinya juga mengandung bahaya baik dari internal maupun eksternal. Juga berbahaya, secara langsung atau tidak langsung, melalui tindakan-tindakan kelalaian atau komisi, menekan kekuatan-kekuatan ekonomi pribumi dan proses-proses peperangan bagi kepentingan kolonial. Kepentingan ini secara langsung dijalankan bagi pengedukan surplus, terutama selama tahap pertama tetapi juga selama tahap lainnya. Hal ini terutama

⁸ Selain itu penaklukan koloni sendiri dalam banyak kasus dilakukan oleh negara kolonial dan hampir semua kasus dibayar oleh negara kolonial dan rakyat kolonial.

⁹ Milliband, R., *The State in Capitalist Society*, 1969, hal. 22.

menunjukkan kebiasaan dari negara kapitalis. Peranan lain negara kolonial mencegah kesatuan di antara rakyat kolonial. Sebaliknya negara kapitalis berupaya untuk mencegah bersatunya kelas pekerja tetapi berusaha aktif untuk mengembangkan kesatuan dan keharmonisan di antara kelas pemilik dan kelas yang tidak bermilik, negara kolonial mencoba menghancurkan munculnya kesatuan nasional di koloni, mengembangkan pembelahan masyarakat kolonial ke dalam berbagai bentuk kelompok sosial, termasuk kelas-kelas sosial, dan meletakkan mereka dalam perselisihan satu sama lain. Secara serempak, masyarakat kolonial diarahkan ke dalam teori bahwa masyarakat kolonial dapat tercerai-berai (disintegrasi) tanpa adanya kolonialisme dan kesatuan masyarakat kolonial hanya dimungkinkan di bawah negara kolonial. Sehingga, perjuangan masyarakat kolonial terhadap anti-imperialisme dicoba dibelokkan ke dalam perjuangan kasta terhadap kasta, 'komunitas' terhadap 'komunitas,' 'suku' terhadap 'suku' dan bahkan kadangkala kelas terhadap kelas.¹⁰

Lebih nyata, negara kolonial tidak hanya menegakkan kondisi-kondisi yang menguntungkan bagi berlanjutnya penguasaan surplus kolonial, namun *secara aktif dan secara langsung memproduksi dan mereproduksi kondisi-kondisi tersebut*, termasuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa, untuk lebih diperluas ketimbang yang dilakukan oleh negara kapitalis. Dan negara kolonial secara aktif membantu pengusaha-pengusaha asing. Terutama secara langsung memberikan bantuan ekonomi, sosial, budaya, politik, dan transformasi legal ke koloni agar reproduksi surplus kolonial skalanya dapat diperluas.

Bagaimanapun, negara kolonial, tidak mampu menanggung beban berat selama fungsi-fungsi *katalogusnya* masih berperan. Munculnya kontradiksi utama di dalam kolonialisme bobot relatifnya ditandai dengan kebijakan kolonial dan fungsi-fungsi

¹⁰ Analisa historis ataupun politik ilmuwan sosial imperialis, fenomena tersebut dijelaskan sebagai refleksi ketika perjuangan anti-imperialis oleh masyarakat kolonial merupakan perjuangan 'ideologi' versus 'kelompok kepentingan' di dalam masyarakat kolonial.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

pendanaan secara langsung pada satu pihak dan pada pihak lain memfungsikan 'transformasi' atau 'pembangunan' masyarakat kolonial. Kontradiksi ini tercermin dalam krisis yang terus-menerus pada anggaran belanja kolonial, pajak yang tinggi terhadap rakyat kolonial, dan menghentikan pertumbuhan fungsi-fungsi 'pembangunan.'

Dalam masyarakat kolonial, keterkaitan antara dengan struktur ekonomi yang mendasari adalah *langsung* dan *eksplisit*. Konsekuensinya, kekuatan-kekuatan anti-kolonial dengan mudah mampu untuk dipenetrasi dan karakter negara kolonial terungkap sebagai instrumen struktur ekonomi kolonial. Sekali lagi ekonomi kolonialisme dapat dianalisa dan dipahami, dengan mudah dan dengan cepat dipahami berdasarkan karakter negara kolonial dan tanpa terkecuali gerakan-gerakan perjuangan anti-kolonial melalui rencana negara dan tingkat politisasi semakin bertambah. Sebaliknya di bawah kapitalisme perjuangan antara kelas pekerja dengan kapitalisme terjadi pada serikat buruh dan perencanaan-perencanaan ekonomi serta tugas-tugas kapitalisme untuk mengangkat rencana politik, teristimewa menampatkan perjuangan bagi kekuatan negara, tetap serius, kompleks, dan persoalan yang tak habis-habisnya, kekuatan anti-kolonial di bawah kolonialisme, hampir diawali, bahkan mereka dimulai dengan tahap-tahap moderat, tuntutananya diarahkan sebagai bagian dari kekuasaan negara, dan kemudian gerak laju ke dalam politik anti-kolonial dibelenggu. Ini merupakan salah satu alasan mengapa perjuangan pembebasan nasional lebih mudah diorganisir ketimbang gerakan-gerakan (kelas) sosial dalam kapitalis ataupun masyarakat pasca kapitalis di mana hubungan antara negara dengan struktur ekonomi yang dominan yang kompleks dan sulit untuk dipahami dan dijelaskan.

(C) Dengan cara yang sama, mekanisme pengawasan kolonial diletakkan pada kulit luarnya, hal tersebut, hampir seluruh kebijakan kolonial dapat dijelaskan melalui proses-proses instrumental, yang mana lebih mudah untuk memahami dan

menyingkapnya. Kepentingan-kepentingan yang bagaimana yang dijalankan oleh negara kolonial? Dari awal jawabnya tidak begitu jelas dan anti-imperialis jawaban yang sederhana. Keterkaitan antara kebijakan-kebijakan administratif kolonial dengan kepentingan-kepentingan metropolitan lebih mudah ditegakkan. Mengapa kepentingan-kepentingan metropolitan lebih diutamakan? Tak pelak lagi, karena nampaknya pengawasan metropolitan sangat luas, bagaimana hal ini dapat dibuktikan bahwa negara kolonial menjalankan kepentingan-kepentingan asing: Merupakan analisis instrumental yang sederhana. Sebaliknya di bawah kapitalisme, kebijakan-kebijakan yang kompleks dan aparat-aparat negara tidak memadai menjelaskan pengertian manipulasi mereka oleh kelas-kelas yang memerintah, di bawah kolonialisme tugas semacam ini tidak sulit. Rakyat kolonial bukan bagian dalam pengambilan kebijakan serta pengawasan aparat-aparat negara dan proses-prosesnya. Ditambah pula milik-milik negara kolonial, karena dasar karakter negara kolonial, kurang mampu untuk mengadakan perbaikan dan tindakan-tindakan kesejahteraan serta mengembangkan keharmonisan antara penguasa dengan yang dikuasai.

Dengan kata lain, negara kolonial buram, negara kolonial kerangka yang tidak jelas, dan mudah dipenetrasi. Legitimasi negara kolonial mudah dihancurkan. Pembuktian empiris kedudukan anti-imperialis mudah dihimpun dan dikembangkan. Sejarah dan kehidupan saat ini penuh dengan kejadian-kejadian dan contoh-contoh yang mencolok. Dua aspek ini konsekuensi penting untuk masyarakat-masyarakat pasca kolonial. Pemimpin-pemimpin yang paling anti-imperialis dijalankan melalui perjuangan kebebasan dengan analisa-analisa instrumental dan diperluas dan, konsekuensinya, gagal untuk berupaya menghancurkan struktur kolonialisme secara total setelah kemerdekaan politik. Mereka datang dengan kepercayaan bahwa setelah mekanisme politik di bawah pengawasan pribumi, koloni berhasil dikolonisasi. Secara serentak, mereka kehilangan peranan ideologi dan budaya kolonial dan aparat-aparat idologinya kerap kali melanjutkan keberadaan

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

dan mengfungsikan secara penuh dan secara bebas dalam situasi pasca-kolonial. Kedua, mencakup dengan kesulitan dan tugas kompleks perjuangan organisasi sosial di dalam masyarakat pasca-kolonial, kelompok-kelompok sayap kiri berhubungan dengan keprihatinan untuk mengorganisir gerakan anti-kolonial dan dengan daya tarik untuk membenahi situasi kolonial dan tugas-tugas dalam pembebasan nasional di masyarakat mereka.

(D) Bagaimanapun, dalam pengertian yang besar, jangkauan analisis struktural bahkan lebih besar dalam negara kolonial ketimbang dalam negara kapitalis. Kenyataannya, aspek instrumental dan aspek struktural dlebih-lebihkan dalam masyarakat kolonial. Jelasnya, negara kolonial bukan birokrasi dan instrumen-instrumen negara kolonial yang mana fungsi-fungsinya ditentukan oleh negara kolonial dan memasukkan kebijakan-kebijakan kolonial.¹¹ Untuk itu kita harus mempelajari struktur kolonialisme, dan yang terpenting struktur ekonomi kolonialnya. Hal ini terutama yang paling penting, sebagaimana kita jabarkan dalam Bagian II, karena struktur kolonial dan konsekuensinya perubahan-perubahan dasar pada kebijakan kolonial dalam tahap-tahap perbedaan kolonialisme bahkan melalui instrumen-instrumen negara lebih kurang dilanjutkan pada hal yang sama. Kolonialisme awalnya dimulai dengan kontradiksi-kontradiksi di dalam. Kebijakan-kebijakan kolonial ditentukan oleh kontradiksi-kontradiksi tersebut dan upaya-upaya untuk memutuskan mereka pada setiap tahap kolonialisme.

(E) Negara kolonial lebih banyak bersandar pada dominasi dan politik, tekanan aparat-aparatnya dan lebih kurang pada 'kepemimpinan' atau 'pengerahan' didasarkan atas perwakilan ketimbang negara kapitalis. Di bawah kolonialisme, perwakilan menguasai pada masyarakat yang paling pasif. Masyarakat kolonial lebih kurang sebuah masyarakat sipil. Kerangka ini, yang mana

¹¹ Hal ini jelasnya nampak pada setiap administrator tingkat kolonial dan pernyataan, bagaimanapun mereka nampak "mengkisahkan" sebagai individu-individu, juga batas tertentu dengan struktur kolonial, bahkan mereka tidak dapat berfikir untuk melampaui kondisi kolonial.

kerapkali dibahas oleh kolonialisme secara potensial menjadi pertentangan di dalam dirinya sendiri, lebih kurang menjadi sosok yang hampa. Hal ini mempunyai dua konsekuensi: (i) negara kolonial sangat cepat masuk ke dalam krisis negara; dan (ii) ruang hampa dengan cepat diduduki oleh kekuatan-kekuatan anti-imperialis yang mana terutama bertugas menjadi kekuatan-kekuatan mobilisasi politik untuk melawan dominasi negara kolonial. Ini, kenyataan, alasan lainnya kenapa masyarakat kolonial pada awalnya lebih mudah untuk mengorganisasi gerakan kemerdekaan nasional ketimbang gerakan sosial.

Dalam kerangka yang terbatas ini, kolonialisme merupakan elemen ideologi yang mempesona yang terdiri dari dua aspek yang berbeda: Pertama mempercayai sistem birokrasi kolonial, dan lainnya penetrasi ideologi dan mengawasi yang dikuasai. Pembahasan semacam ini tidak menguntungkan, maupun untuk mempelajari struktur masyarakat kolonial secara akurat. Dalam mempelajari struktur kolonialisme perlu untuk menganalisa ideologi kolonialisme dalam tahap-tahap masyarakat kolonial yang berbeda, baik secara teoritis maupun secara politik. Umpamanya, dalam tahap kedua kolonialisme, rakyat kolonial dibujuk dengan janji modernisasi secara keseluruhan termasuk pembangunan ekonomi, budaya modern, dan diperkenalkan politik modern dan gagasan-gagasan politik termasuk pemerintahan-sendiri dan demokrasi. Dalam tahap ketiga, pada satu pihak, penekanan pada tindakan kebajikan dan depolitisasi. Ketidak-mampuan permanen rakyat kolonial yang 'kekanak-kanakan' untuk mengatur diri mereka sendiri atau untuk ketegasan praktek demokrasi. 'Rakyat yang kekanak-kanakan' juga tidak mampu untuk berpolitik, mereka hanya dapat menjadi penerima kebajikan yang pasif.

Sehingga, secara aktif otoritas kolonial berlawanan dengan politisasi rakyat dan mengajarkan ideologi yang tidak politis. Sepanjang periode ini mereka menyebarkan politik-politik yang tidak loyal tetapi dalam politik yang non-partisipasi. Mereka mengambil jalan lain bagi politik-politik yang loyalis dan politik

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

memecah belah komunal, kasta, atau 'suku' hanya setelah upaya-upaya pencegahan politisasi anti-imperialis mengalami kegagalan.

(F) Apakah keterkaitan antara negara kolonial dan asing serta kelas-kelas pribumi yang dieksploitasi? Negara kolonial secara sempurna disubordinasikan oleh burjuis negara metropolis dan burjuis metropolitan secara keseluruhan. Oleh sebab itu negara kolonial kurang mempunyai karakteristik otonomi relatif negara kapitalis. Walaupun demikian, negara kolonial, mempunyai otonomi yang saling berhadapan (*vis-a-vis*) dengan setiap kapitalis atau setiap kelompok kapitalis. Negara kolonial menjalankan kepentingan jangka panjang bagi kelas kapitalis metropolitan tetapi tidak selamanya bergantung pada (*behest*) mereka. Dengan pengertian, barangkali negara kolonial memiliki lebih besar tingkat otonomi relatif ketimbang negara kapitalis. Struktur negara kolonial atas koloni bukan arena percekocokan bagi pengembangan kepentingan-kepentingan yang berlainan pada kelompok-kelompok kapitalis metropolitan yang berbeda. Perselisihan terjadi di lembaga-lembaga negara metropolitan. Umpamanya, perjuangan politik untuk membuat negara kolonial sebagai instrumen transisi dari tahap kolonialisme pertama ke tahap lainnya terjadi di metropolis.

Secara mendasar kolonialisme adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Tetapi sebaliknya di bawah kapitalisme keterkaitan ini muncul di antara kelas-kelas, di bawah kolonialisme kaitan tersebut ditegakkan antara kelas penguasa asing dengan rakyat kolonial secara keseluruhan. Hal ini karena karakteristik negara kolonial sangat berbeda. Tugas utama negara kolonial tidak memungkinkan untuk mengeduk nilai lebih melalui subordinasi kelas atau kelas-kelas, tetapi menggabungkan ekonomi kolonial dan menundukkan masyarakat kolonial untuk ekonomi metropolitan, tidak memungkinkan untuk mengeksploitasi koloni secara keseluruhan. Konsekuensinya, kolonialisme mendominasi seluruh kelas pribumi di koloni. Salah satu aspek yang paling penting dari struktur kelas koloni *kelas penguasa adalah asing dan pemilikan*

*klas-klas domestik bukan bagian dari klas penguasa; bahkan mereka bukan bagian dari persekutuan subordinasi atau partner junior; mereka secara sempurna dikuasai oleh klas penguasa; mereka secara keseluruhan "sama-sama impoten dan sama-sama bisu, mereka jatuh terbenam sebelum dikuasai."*¹² Burjuis metropolitan boleh mengambil surplus sosial di koloni dengan klas atas pribumi tetapi burjuis metropolitan bagian dari kekuasaan negara bersama mereka. Bahkan tuan-tuan semi-feodal dan para komprador bukan bagian dari kekuasaan negara kolonial. Aspek proposisi umum lainnya bahwa klas penguasa masyarakat kolonial tidak dikontrol oleh kekuasaan negara karena kekuatan ekonomi berasal dari pemilikan pribadi alat-alat produksi di koloni. Secara serentak, negara kolonial melindungi klas-klas pribumi yang dieksploitasi tetapi dalam rangka melindungi kepentingan-kepentingan pemilikan negara kolonial, dengan cara, mengawasi kebebasan berpolitik mereka. Negara kolonial tidak melindungi mereka kecuali sepanjang mempertahankan hakekat pemilikan pribadi di dalam masyarakat burjuis, termasuk versi masyarakat kolonial.¹³ Pada kenyataannya, aspek ini menentukan dasar manuver politik negara kolonial. Manuver politik negara kolonial ini, untuk periode tertentu dan dalam situasi tertentu, memakai tuan-tuan tanah dan penyewa-penyewa dan kapitalis-kapitalis serta pekerja-pekerja berlawananan satu sama lain. Sehingga manuver politik negara kolonial tidak akurat untuk menggambarkan pemecahan klas atas kolonial atau klas menengah sebagai elit politik. Klas penguasa asing didudukkan dalam keterkaitan majikan dengan mereka semua yang disebut di atas.

Keterkaitan antara negara kolonial dengan klas-klas atas pribumi secara krusial berbeda dengan koloni-koloni dan semikoloni-semikoloni. Lebih jauh, contohnya, Cina, Mesir setelah 1920,

¹² Dikutip dari Marx, yang mana ia mengacu kepada keterkaitan antara klas-klas di Prancis dengan Louis Bonaparte, *The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte*, New York, International Publishers, n.d. hal. 106.

¹³ Dengan demikian, sejarah kolonial, banyak contoh di mana negara kolonial mengeduk pemilikan pribadi dari klas-klas pemilik pribumi.

Kolonialisme, Tahap-Tahap Kolonialisme dan Negara Kolonial

Thiland, dan negeri-negeri Amerika Latin, tuan-tuan tanah komprador, atau bagian-bagian burjuis nasional yang merupakan bagian dari koalisi kelas yang menegakkan kelas penguasa; mereka dapat dikatakan *junior* atau bahkan partner *senior* dengan negara.

Masihkan ada persoalan kompetisi melalui kebijakan-kebijakan negara antara penguasa kelas kolonial dengan kelas atas pribumi, sebagaimana beberapa teori politik mempersoalkan hal tersebut. Pada rakyat kolonial tidak terdapat kelompok yang berbentuk 'kelompok kepentingan yang bersaing' di dalam struktur negara kolonial. Kebijakan-kebijakan negara kolonial *yang berasal dari luar struktur negara* mempengaruhi kelas-kelas pribumi, melalui partai loyalisme atau partai dan gerakan-gerakan anti-imperialisme; mereka melakukan tindakan pemerasan dari konsesi-konsesi. Maka, setelah gerakan anti-imperialis muncul, gerakan tersebut berakibat pada kebijakan kolonial oleh karena itu negara kolonial perlu untuk 'menanggapi' gerakan tersebut, kadangkala dengan bujukan dan kadangkala dengan kekerasan. Ini semua secara lengkap diakui oleh kelas atas pribumi.

Kesimpulannya, sekedar menjelaskan kolonialisme, pengawasan metropolitan, dan negara kolonial yang terbaik dapat disingkap dengan banyak mempelajari kontradiksi-kontradiksi kolonialisme di dalam. Umpamanya, kontradiksi ekonomi kolonialisme yang krusial memunculkan kebutuhan obyektif untuk menyusun reproduksi ekonomi kolonial dan konsekuensi obyektif proses produksi kolonialisme hasilnya bertentangan, hal ini mengarah kepada dua kontradiksi lainnya: (i) hubungan 'eksternal' antara rakyat kolonial dan pembangunan sosial mereka dengan peranan kolonialisme terhadap proses subyektif perjuangan rakyat kolonial untuk meruntuhkan kolonialisme; dan (ii) hubungan internal yang mana cenderung membuat koloni bertambah 'sia-sia' atau tidak mampu menjalankan kebutuhan-kebutuhan kapitalisme metropolitan atas skala yang diperluas. Selama tahap ketiga, sejumlah besar koloni gagal melaksanakan jalan ke luar yang memadai bagi kapital metropolitan atau bahkan manufaktur-

manufaktur metropolitan. Selain itu, di antara mereka banyak yang menjadi jaringan importir bahan-bahan makanan! Negara kolonial sekarang memainkan peranan untuk mengatasi kedua kontradiksi tersebut, pada satu pihak melalui penindasan dan hal-hal yang menakjubkan (*mystification*) dan pada pihak lain melalui 'pembangunan' yang dapat mengambil bentuk memberikan 'bantuan' dalam kasus masyarakat semi-koloni dan masyarakat pasca-kolonial.

>>><<<